

BAB II

KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA MENJELANG DAN DIAWAL DEKADE ABAD KE-21

2.1 Konflik-Konflik Sosial yang Penting

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak sejarah konflik sosial. Dimulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini (tengah tahun 2009), terhitung banyak sekali kasus-kasus konflik sosial yang bermunculan. Di antara berbagai peristiwa konflik sosial tersebut masih saja ada yang belum ditemukan titik terangnya sampai satu dekade awal abad ke-21 ini, baik tentang siapa aktor intelektual konflik sosial di balik konflik-konflik tersebut maupun masyarakat yang menjadi korban yang sampai saat ini belum diketahui di mana keberadaannya. Intensitas dari peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia tersebut bukannya semakin menurun melainkan semakin meningkat, terjadi secara terang-terangan, dan bahkan sangat brutal. Salah satu contoh kasus tersebut ialah penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) atau biasa kita kenal peristiwa Monas berdarah. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 2008¹, dalam peristiwa tersebut tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban tetapi juga anak-anak mengalami penyerangan fisik secara langsung dan yang lebih mengerikan lagi peristiwa tersebut terjadi di dalam kawasan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Monumen Nasional, yang merupakan salah satu lambang kebanggaan bangsa ini. Sungguh pelik memang bangsa ini, dalam kemajemukannya yang teramat kaya ternyata juga tersimpan potensi konflik yang luar biasa. Di tengah-tengah semboyan “Persatuan dan Kesatuan” (yang merupakan sila ke tiga dari Pancasila yang menjadi acuan dasar semangat kebangsaan negeri ini) konflik sosial masih saja terus terjadi bahkan cenderung meningkat akhir-akhir ini.

¹ [Http://kompas-online.com/2008/06/monas-berdarah.htm](http://kompas-online.com/2008/06/monas-berdarah.htm), 27 Juni 2009, pukul 13:00 BBWI.

Berbagai macam konflik kemanusiaan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam hal, yaitu: suku, agama, kelas, kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu, dan hasrat ingin memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Konflik sosial dengan latar belakang suku di antaranya, yaitu: kerusuhan Sampit di Kalimantan (antara suku Dayak dengan Madura), dan kerusuhan antara Forum Betawi Rempug dengan Suku Madura yang terjadi di daerah Jakarta Timur; dengan latar belakang agama terjadi di beberapa daerah, yaitu: Poso (yang melibatkan dua agama besar yaitu Islam dan Kristen), Ternate, dan Ambon; dengan latar belakang perbedaan keyakinan, di antaranya: penyerangan terhadap aliran Ahmadiyah, kelompok tarekat sufi seperti Naqsyabandiyah di Bulukumba, Sulawesi Selatan, sampai pesantren dan kelompok pengajian biasa, Miftahul Huda di Banten, kelompok *indigenous belief* seperti Dayak Losarang di Indramayu;² dengan latar belakang kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu, yaitu: kerusuhan Mei 1998, kasus Trisakti, kasus 27 Juli, Timor-Timur (sekarang Timor Leste) dan kasus Tanjung Priok; dan dengan latar belakang gerakan kemerdekaan yang terjadi antara warga sipil bersenjata dengan militer, yaitu: konflik antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), konflik antara TNI dengan RMS (Republik Maluku Selatan) dan konflik antara TNI dengan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Berbagai macam konflik kemanusiaan tersebut sangat kental diwarnai oleh adanya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di dalamnya.

Kurangnya rasa saling menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, fanatisme (rasa cinta terhadap agama yang berlebihan) dan pemaksaan akan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu ke dalam suatu komunitas yang berbeda latar belakang merupakan faktor penyebab timbulnya berbagai macam konflik kemanusiaan tersebut. Sikap-sikap semacam ini yang menyebabkan rasa saling memiliki dan rasa solidaritas antara individu-individu di dalam masyarakat yang berbeda latar belakang menjadi semakin berkurang atau bahkan hilang. Setiap budaya, suku, agama atau aliran kepercayaan tertentu berdiri atas

² [Http://www.wahidinstitute.org/kasus_ahmadiyah_dan_problematika_kebangsaan](http://www.wahidinstitute.org/kasus_ahmadiyah_dan_problematika_kebangsaan), 23 Mei 2009, pukul 22:30 BBWI.

pemahaman budayanya sendiri dan memiliki cara pandang masing-masing tentang perbedaan latar belakang kehidupan yang ada. Pemaksaan akan kehendak atau peraturan yang belum mendapatkan kesepakatan dari masyarakat yang berbeda pemahaman tentu akan menimbulkan konflik-konflik baru. Konflik yang akan terus berlanjut dan menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan.

2.2 Fanatisme Keagamaan sebagai Salah Satu Akar Konflik

Agama itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa arab "aqoma" yang berarti menegakan, sementara kebanyakan ahli mengatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa sansekerta "a" dan "gama". "a" adalah tidak dan "gama" berarti berantakan. Agama berarti tidak berantakan.³ Agama dalam kehidupan manusia yang menjadi wadah manusia dalam sosial kemasyarakatannya dan juga sebagai wadah spiritual manusia dalam imannya terhadap Tuhan. Oleh karena konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan, maka tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya kemudian konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap suatu hal.⁴ Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai, agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas, sebagaimana tersurat dalam kutipan berikut:⁵

“Apabila terdapat suatu hal yang bersifat kontroversial, pada umumnya orang akan mencari informasi lain untuk memperkuat posisi sikapnya, atau mungkin juga orang tersebut tidak mengambil sikap memihak. Dalam hal seperti itu, ajaran moral yang diperoleh dari agama sering kali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap”.⁶

Agama diciptakan untuk membawa manusia ke dalam kebahagiaan. Untuk menuju kepada kebahagiaan tersebut manusia akan menjalankan apa yang

³ Arqom Kuswanjono, *Ketuhanan dalam Telaah Filsafat Perennial*. (Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2006), hal 74.

⁴ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*.(Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 29-30.

⁵ Jalaluddin, *Psikologi Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal 226.

⁶ Saifuddin Azwar, *op.cit.* hal 30.

diperintahkan oleh Tuhannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama karena agama diyakini oleh para umatnya sebagai bentuk interpretasi perintah yang berasal dari Tuhan. Keyakinan yang begitu kuat bahwa agama sebagai bentuk interpretasi Tuhan secara tidak langsung menjadikan agama itu sendiri adalah bentuk Tuhan. Pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang amat berbahaya karena kecintaan umat yang begitu mendalam pada Tuhan terwujud juga kecintaannya kepada agama (institusi), disebabkan ia yakini sebagai bagian dari Tuhan. Berangkat dari penafsiran tersebut, kecintaan yang berlebihan (fanatisme) umat beragama kepada agamanya akan menyebabkan kedangkalan pemahaman akan kemajemukan kehidupan keberagamaan dan rasa solidaritas yang semakin menghilang antarpemeluk agama. Kata *fanatic* sendiri berasal dari bahasa latin, *fanum*, yang berarti rumah suci untuk kegiatan ritual keagamaan. Begitu masuk *fanum* maka seseorang akan menutup pintu dan memutuskan diri dari dunia luar sehingga seseorang akan kehilangan perspektif-komparatif. Itulah sebabnya kata fanatik berkonotasi negatif dan eksklusif karena sulit untuk menerima pandangan yang berbeda.⁷

Tuhan yang diyakini sebagai Yang Tunggal, tentu akan menimbulkan pemahaman bahwa hanya agama dan Tuhan dalam agamanya sebagai yang benar dan nyata, sedangkan di luar itu keliru. Pandangan demikian itu akan menjadikan rasa solidaritas keagamaan hanya terbentuk pada umat-umat keagamaan yang memiliki identitas agama yang sama. Sementara itu rasa solidaritas antarpemeluk keagamaan justru semakin memudar bahkan hilang. Fungsi dari agama yang seharusnya menghindari konflik, justru memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis yang menjadikan seorang atau kelompok beragama bertambah rasa percaya dirinya bahwa bentuk perilaku konflik (penyerangan terhadap umat agama lain) yang dilakukannya adalah bentuk perintah Tuhan. Agama yang memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis terhadap bentuk perilaku umat (penyerangan terhadap umat agama lain) yang demikian menyebabkan semakin memperteguh tekad seorang atau kelompok beragama untuk melanjutkan konflik keagamaannya karena perintah agama diyakini sebagai bentuk perintah dan ajaran yang berasal dari Tuhan. Hal seperti itu yang

⁷ Hakimul Ikhwan Affandi, op.cit. hal 168.

menyebabkan perilaku seorang atau kelompok beragama semakin mempertajam permusuhan dan memistikan motif pertentangan menjadi perjuangan membela iman dan kebenaran masing-masing, singkat kata demi Tuhan sendiri⁸ yang dalam hal ini Tuhan partikular. Seseorang atau kelompok orang penganut agama akan lebih memilih berperang dibandingkan dengan membicarakan permasalahan yang ada melalui meja perundingan. Anggapan tersebut muncul karena orang lain atau kelompok orang telah menghina Tuhan kecilnya. Ketika berperang mereka dijanjikan oleh agama sebuah surga yang penuh dengan kenikmatan, dibandingkan dengan mereka diam dan menghadapi neraka yang penuh dengan penderitaan. Tentunya mereka lebih memilih untuk mati dalam perang yang membawa pada nikmat surgawi. Para pemeluk agama yang seperti ini tidak meyakini akan adanya Tuhan yang universal, yang merupakan Tuhan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bentuk Pemahaman seperti ini akan membawa manusia ke dalam fanatisme yang berlebihan yang mengakibatkan konflik akan terus terjadi dan tidak akan pernah berakhir. Sifat fanatisme ini dinilai sangat berpotensi dapat merugikan kehidupan beragama di kemudian hari.

Hannah Arendt, filsuf politik murid Heidegger, mengingatkan: “Kita tergoda untuk mengubah dan menyalahgunakan agama menjadi ideologi dan menodai usaha yang telah kita perjuangkan melalui totalitarisme dengan suatu fanatisme. Padahal, fanatisme adalah musuh besar kebebasan”.⁹ Fanatisme selalu menimbulkan masalah konflik dan kekerasan, hal tersebut dikarenakan dalam fanatisme seseorang berpikiran sempit terhadap perbedaan yang ada dan menganggap perbedaan sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Lahan subur fanatisme bukan pertama-tama orang bodoh yang mudah dipengaruhi, tetapi mungkin lebih dekat dengan yang disebut Hannah Arendt sebagai ”individu massa” yang tidak berkepribadian itu: orang yang tidak membedakan kenyataan dari makna apa yang terjadi; orang yang tidak mempertanyakan lagi perbedaan antara kebenaran dan makna wacana; orang yang terlepas dari pijakan realitas. Kelemahan mendasar seorang fanatik ialah tidak mampu mengambil jarak terhadap keyakinannya, tidak kritis lagi terhadap keyakinan dan tindakannya. Jadi,

⁸ Haryatmoko, op.cit. hal 63.

⁹ Haryatmoko, op.cit. hal 67.

intelektual pun rentan terhadap fanatisme apabila tidak terdapat keluasan untuk penelaahan pemikiran lebih lanjut. Sifat fanatis seperti tersebut di atas dibedakan dari ketaatan. Sebab ketaatan merupakan upaya untuk menampilkan arahan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama.¹⁰ Arahan tersebut merupakan sebuah proses dan bukti, bahwa seorang umat telah menuju ukuran pencapaian yang jelas, yaitu kebaikan. Agama sebagai jalan kebaikan seharusnya terwujud dalam perilaku umatnya yang juga mencirikan kebaikan tersebut, tentunya apabila umat beragama tersebut menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya sebagai sebuah prinsip kebaikan. Ketaatan dan kesyahduan umat beragama dalam menjalankan ritual keagamaannya ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan. Sikap fanatisme menjadikan umat beragama terlalu terfokus kepada kegiatan atau ritus keagamaannya yang menyebabkan toleransi atau kepekaan sosial hanya terjadi antara para pemeluk agama yang sama dan tidak terjadi dalam lingkup yang lebih luas yaitu antarpemeluk agama.

Isu-isu keagamaan yang berkembang di dalam masyarakat ataupun media massa merupakan bahaya yang nyata dalam kehidupan keberagaman masyarakat Indonesia. Rasa solidaritas yang begitu tingginya antara pemeluk agama (terjadi dalam lingkup satu agama) dapat menjadi semacam semangat kebersamaan yang akan muncul dalam bentuk perlawanan terhadap apa yang dianggap salah oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu agama terhadap pemeluk agama lain yang berbeda identitas keagamaannya. Misalnya, antara umat islam dan Kristen, antara umat hindu dan umat Budha dan sebagainya. Permasalahan yang ada bukan dianggap sebagai suatu hal wajar sebagai bentuk demokrasi di tengah-tengah kehidupan bangsa yang majemuk ini, permasalahan yang ada dianggap sebagai suatu bentuk penghinaan yang mendalam terhadap agamanya atau lebih parah lagi dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap Tuhan. Para penganut agama yang merasa Tuhannya telah dinistakan oleh seseorang atau kelompok orang yang berbeda keyakinan menganggap tidak ada jalan lain selain harus dihadapi dengan jalan kekerasan.

¹⁰ Jalaluddin, op.cit. hal 223.

Terbentuknya pemahaman pemeluk agama tentang kehidupan keberagamaan tidak terlepas dari peran para tokoh agama yang bersangkutan. Pemberian pengetahuan keagamaan yang disampaikan oleh tokoh agama melalui ceramah-ceramah keagamaan membentuk landasan pengetahuan seseorang akan pemahaman posisi dirinya sebagai umat beragama dan posisi dirinya sebagai manusia yang berada dalam kehidupan keberagamaan. Perlunya pemimpin agama yang memiliki pandangan yang luas terhadap berbagai fenomena kehidupan akan menjadikan agama sebagai sebuah jalan kedamaian yang benar-benar berguna bagi sebuah bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia ini. Namun hal yang sebaliknya juga akan terjadi (sebaliknya) jika pemahaman para pemimpin agama (yang) terlalu fanatis terhadap ajaran agamanya sendiri, yakni (akan menjadikan) para penganut keagamaan menjadi tidak jauh berbeda dari para pemimpin agamanya, yaitu memiliki sikap fanatis yang berlebihan. Fungsi yang belum maksimal dari para pemimpin agama yang ada tersebut yang menjadikan para penganut agama merasa bahwa agamanya adalah agama yang paling benar dan agama yang lain adalah keliru. Selain fungsi penyampaian akan makna agama sebagai perintah Tuhan yang harus terwujud dalam bentuk perilaku umat yang membawa nilai-nilai kebaikan dari para pemimpin agama yang belum maksimal, ketaatan buta terhadap pemimpin agama juga akan membentuk pola keagamaan yang membabi buta dengan dimensi fanatisme yang berlebihan.¹¹

Keyakinan yang begitu kuat dari seorang individu bahwa agamanya adalah agama yang paling benar menimbulkan semangat solidaritas (keeratan hubungan antara para pemeluk agama) yang begitu tinggi antara para pemeluk agama. Loyalitas yang begitu tinggi terhadap agamanya dan acuh tak acuh begitu dihadapkan dengan identitas agama lain merupakan suatu bentuk dinamika sosial (keadaan sosial yang terbentuk oleh perilaku manusia dalam sosial) yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, di mana seseorang akan cepat tanggap apabila agama atau rekan seagamanya berada dalam kesulitan dan sangat jauh berbeda ketika orang lain yang berbeda agama membutuhkan pertolongan. Jika setiap penganut agama memiliki keyakinan yang demikian mereka akan membawa rasa

¹¹ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2008), hal 20.

solidaritas yang amat tinggi antara pemeluk agama dan menghilangkan rasa solidaritas antarpemeluk agama.

2.2.1 Kedangkalan dalam Pemahaman atas Nilai-Nilai Keagamaan

Agama sebagai sebuah institusi bertujuan untuk membimbing umatnya kepada jalan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk menuju kepada keselamatan tersebut agama memiliki aturan-aturan (yang) berupa perintah atau larangan, tidak hanya perintah atau larangan, agama juga berisikan nilai-nilai tentang kehidupan. Nilai-nilai yang merupakan pedoman bagi umat untuk mencapai kehidupan harmonis, baik kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kehidupan religiusnya. Untuk lebih memahami akan pentingnya nilai-nilai universal keagamaan (yang terwujud dalam ajaran agama-agama) bagi perkembangan moral umat beragama, kita dapat melihat contoh dari berbagai nilai-nilai universal keagamaan pada agama Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Islam, sebagai berikut :

“Pada agama Hindu ada tiga kunci pokok yang selalu ditekankan kepada para pengikutnya untuk selalu diterapkan dalam hidup yaitu : “Rta”, “Satya” dan “Dharma”. Rta yang mengandung pengertian aturan-aturan moral dalam hidup yang harus selalu ditegakkan. Satya berarti kebenaran yang harus selalu ditegakkan dalam kehidupan manusia. Dharma adalah ajaran Hindu yang sangat menjunjung tinggi kebenaran; dalam agama Budha nilai-nilai universal yang intinya menganjurkan para pengikutnya untuk selalu menegakkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan umat manusia juga dapat ditemukan dengan mudah. Hal ini terbukti bahwa agama Budha memosisikan ajaran menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan yang disebut “*Hasta Ary Marga*” sebagai sebuah ajaran yang penting dan utama. Ajaran ini juga disebut “*Majjhimapattipada*”, yaitu sebuah prinsip untuk menghindari dua hal yang terlarang dalam agama Budha. Dua hal tersebut adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai kebahagiaan dan mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang merugikan diri sendiri baik dalam bentuk lahir maupun batin; dalam agama Katolik terdapat “Sepuluh perintah Allah” (*The Ten Commandment*) sebagai pedoman hidup umatnya. Menerapkan cinta kasih untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan

dan antara manusia dengan manusia lainnya; dalam agama Protestan kita juga dapat menemukan perintah-perintah yang menekankan agar pengikutnya mengikuti ajaran moral Kristen; yaitu selalu menjunjung tinggi moral untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang buruk agar mampu untuk hidup abadi di surga dan terhindar dari neraka. Dengan melakukan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk dipercaya akan dapat merubah masyarakat menjadi tentram dan makmur; dan yang terakhir dalam ajaran agama Islam, nilai-nilai universal tentang kebenaran, keadilan dan perlunya membangun kesejahteraan umat manusia juga menjadi pokok ajaran bagi pengikutnya. Islam menganjurkan untuk selalu hidup di jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang buruk. Selain itu, Islam juga menganjurkan pada pengikutnya untuk selalu menjaga hubungan antar sesama manusia dan menjaga hubungan dengan Tuhannya”.¹²

Contoh-contoh yang disampaikan di atas hanya sebagian dari banyaknya ajaran agama atau nilai-nilai keagamaan universal lainnya. Beberapa contoh di atas membuktikan bahwa meskipun nama agama dan aliran kepercayaan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki nilai-nilai universal yang sama.¹³ Contoh nilai-nilai keagamaan tersebut semuanya mengarah kepada kebaikan. Kebaikan yang akan membawa manusia kepada kehidupan harmonisnya. Pentingnya pemahaman seorang umat akan nilai-nilai keagamaan tersebut adalah sebagai sebuah dasar pengetahuan bagi terciptanya perilaku keagamaan. Perilaku keagamaan sebagai seorang manusia yang beriman kepada Tuhan dan sebagai manusia yang ada di dalam kehidupan sosial keagamaan. Betapa mengerikannya apabila seorang yang mengaku beragama tetapi tidak memahami (tentang) nilai-nilai keagamaannya. Umat beragama yang demikianlah yang sangat berbahaya bagi perkembangan kehidupan keberagaman, hadir di dalam masyarakat sebagai umat yang beragama tetapi perilaku keagamaannya tidak mencerminkan sebagai umat yang membawa nilai-nilai keagamaan.

“Padatnya masjid, gereja, pura dan klenteng oleh jemaat yang melakukan peribadatan, justru menunjuk kepada dangkalnya penghayatan agama bangsa kita. Seolah-olah dengan kesyahduan orang

¹² M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal 41-45.

¹³ Ibid, hal 46.

beribadah dan mela-kukan ritus-ritus keagamaan sudah terpenuhi tugas agama dalam kehidupan. Ibadah menjadi dipersempit pengertiannya, dan ritus-ritus keagamaan menjadi inti kehidupan beragama... Semakin hilangnya kepekaan sosial akibat semakin mengentalnya kadar ritual dalam kehidupan beragama, dalam jangka panjang justru akan membawakan bahaya-bahaya sendiri bagi kehidupan kita.”¹⁴

Kedangkalan pemahaman umat beragama terhadap nilai-nilai keagamaan akan menyebabkan pengaruh buruk yang bukan berasal dari nilai-nilai keagamaan itu sendiri mudah masuk. Bentuk provokasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menyebabkan umat beragama (yang pemahamannya dangkal akan nilai-nilai keagamaan) mudah terpengaruh. Terpengaruh untuk melakukan kekerasan, kejahatan, kerusuhan dan segala macam tindakan anarki lainnya. Dengan latar belakang seperti itulah yang menyebabkan pemahaman umat beragama akan nilai-nilai keagamaan yang ada menjadi begitu penting.

2.2.2 Kedangkalan dalam Pemahaman atas Eksistensi Tuhan

Seorang umat beragama yang taat akan selalu berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Bentuk usaha manusia tersebut merupakan wujud kecintaannya kepada Tuhan. Ketaatan manusia terhadap perintah Tuhan merupakan bentuk pemahamannya akan eksistensi atau keber-Ada-an Tuhan. Pemahaman manusia akan eksistensi Tuhan memang tidak dapat dibuktikan secara empiris, tetapi hanya melalui iman dan pengalaman spiritual manusia itu sendiri. Tuhan sebagai cerminan kebaikan yang ideal, menjadikan manusia selalu berusaha untuk menuju kepada kebaikan ideal tersebut.

Berbagai konflik kemanusiaan yang terjadi tidak mencerminkan bentuk kecintaan dan pemahaman manusia akan adanya Tuhan, hal tersebut dikarenakan manusia tidak memaknai akan eksistensi Tuhan dalam kehidupan. Ketidapkahaman akan eksistensi Tuhan menjadikan seseorang berperilaku tidak sesuai dengan Tuhan sebagai prinsip “kebaikan ideal”. Tuhan tidak mengajarkan

¹⁴ M. Masyhur Amin, *Moralitas Pembangunan : Perspektif Agama-Agama di Indonesia*. (Yogyakarta : LKPSM NUI DIY, 1994), hal 5.

manusia untuk berbuat selain kebaikan. Pemahaman seperti ini menjadi poin penting untuk mengerti bahwa konflik kemanusiaan yang terjadi bukanlah tindakan dari umat beragama yang sesungguhnya. Umat beragama yang terlibat dalam konflik tersebut adalah umat agama yang dangkal dalam pemahamannya akan eksistensi Tuhan. Jika manusia memahami eksistensi Tuhan maka dalam perilakunya, manusia akan selalu menuju pada “kebaikan ideal” seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umat beragama.

2.3 Degradasi Kualitas Manusia Indonesia sebagai Akibat Krisis dalam Dunia Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana bagi manusia untuk belajar ke arah yang lebih baik. Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pendidikan, hendaknya pendidikan dimaknai sebagai bentuk evaluasi dan kritik terhadap nilai-nilai budaya yang telah ada. Dalam pendidikan, menumbuhkan sikap kritis itu sama perlunya dengan melangsungkan estafet budaya, karena jika tidak para peserta didik bangsa hanya akan menjadi pengekor saja terhadap berbagai perkembangan dan kemajuan kebudayaan. Maunya disuapi dan tak mau menciptakan suatu inovasi atau tidak berani mengatakan “tidak” pada kebudayaan yang tidak sesuai dengan bangsa ini. Begitu pentingnya sikap kritis tersebut sebagai sebuah jalan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tetap tersampaikan pada generasi berikutnya dan nilai-nilai budaya asing yang masuk sedemikian derasnya tidak menggantikan nilai-nilai luhur budaya bangsa sendiri. Karena itu, peserta didik bukan hanya diberi, tetapi juga dirangsang untuk bersikap kritis berdasarkan pengalaman lingkungan hidupnya.¹⁵ Budaya pendidikan yang hanya sebagai bentuk pewarisan dari nilai-nilai yang telah ada sebelumnya akan menyebabkan nilai-nilai budaya yang sebenarnya tidak relevan menjadi terus terwarisi, hal tersebut menjadikan hakikat dari fungsi pendidikan yang sebenarnya tidak tercapai.

Keadaan zaman yang terus berkembang menuntut suatu sistem pendidikan yang harus terus disesuaikan, Jika pendidikan tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau budaya, maka pendidikan hanya akan menciptakan manusia-manusia

¹⁵ Jakob Sumardjo. Mencari Sukma Indonesia. (Yogyakarta: AK Group, 2003), hal 55.

yang tidak siap untuk bersaing dengan kemajuan yang ada. Bentuk penyesuaian sistem pendidikan terhadap kemajuan zaman terus dilakukan oleh bangsa Indonesia, hal tersebut dilakukan dengan cara merubah kurikulum pendidikan yang ada. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah memang demikian seharusnya? Jawabannya adalah: Ya, memang seharusnya demikian. Pola kurikulum yang ada harus terus disesuaikan dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya dan perkembangan kehidupan lainnya. Lalu pertanyaan berikutnya muncul: kenapa bangsa ini belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan? Padahal kurikulum terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah yang terjadi pada bangsa ini di mana semangat akan perubahan tidak dibarengi dengan sikap kritis terhadap sesuatu yang berasal dari luar budaya bangsa sendiri. Penerapan pola pendidikan bangsa Indonesia dengan cara meniru bangsa-bangsa Eropa yang telah maju atau meniru pola pendidikan bangsa Jepang yang pada kenyataannya memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda. Peniruan pola pendidikan seperti ini sangat tidak tepat. Pola pendidikan yang ada seharusnya benar-benar sesuai dengan budaya bangsa sendiri. Sepertinya bangsa kita telah lupa bahwa budaya pendidikan negara-negara maju ini bertolak dari kebudayaan mereka sendiri. Apa yang mereka ajarkan adalah pencapaian-pencapaian budaya nenek moyang mereka. Pendidikan negara-negara maju ini, dilihat secara budaya, merupakan garis lurus perjalanan cara berfikir, cara berbuat dan semua produk kegiatan itu. Sementara bangsa kita mempunyai garis sejarah budaya yang berbeda¹⁶. Tidak hanya peniruan pola pendidikan yang salah, universalisasi kurikulum pendidikan terhadap bangsa ini yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda juga merupakan suatu bentuk kesalahan. Kurikulum yang diberikan haruslah berbeda, sesuai dengan latar belakang budaya dan kemampuan daerah masing-masing dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang ada. Pentingnya pengkategorian pemberian kurikulum dikarenakan semua ilmu itu dimulai dengan konteks pengalaman budaya anak sendiri. Dengan demikian, mengajarkan ilmu bumi di Manado berbeda dengan di Sumedang, ilmu hitung di Jakarta akan berbeda dengan ilmu hitung di Magelang.¹⁷

¹⁶ Ibid, hal 56.

¹⁷ Ibid, hal 60.

Permasalahan ketidakjelasan sistem pendidikan di negeri ini tidak hanya pada penjiplakan sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa sendiri, Perubahan pola sistem pendidikan yang ada di Indonesia pun terasa begitu cepat. Hal tersebut terlihat jelas ketika pergantian kabinet di pemerintahan, menteri pendidikannya diganti maka diganti pula berbagai program, struktur, dan materi pendidikan yang telah ada sebelumnya. Dengan keadaan seperti itu kualitas sistem pendidikan di negeri ini menjadi terkesan belum matang atau boleh dibilang masih coba-coba. Ketidakjelasan sistem pendidikan bangsa ini tidak berhenti pada titik itu, dengan alasan ketidakmampuan menyediakan anggaran, pemerintah menurunkan muatan beberapa materi kurikulum. Hasil akhir dari kebijakan pemerintah tersebut dapat kita lihat bahwa anak bangsa tercerabut dari tradisi lapangan hidup pertanian, kenelayanan, perajin dan mental *entrepreneur* pun hilang. Pada tingkat yang lain, para sarjana tidak gemar membaca dan menulis baik dalam bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris, sehingga kualitas dan mentalitas kecerdasannya pun rendah.¹⁸ Betapa carut-marutnya sistem pendidikan negeri ini.

Degradasi yang terjadi di dunia pendidikan tidak hanya terjadi karena sistem pendidikan yang tak jelas dan pola penjiplakan sistem pendidikan bangsa barat, pemerintah juga menerapkan pola pendidikan yang bernuansa Politik. Antara lain menjadikan setiap tingkat perguruan tinggi sebagai sarana indoktrinasi politik demi stabilitas kekuasaan. Kebijaksanaan politik kekuasaan membutuhkan warga masyarakat yang berbudaya "*nrimo*" (menerima apa adanya tanpa ada keberanian untuk bertanya atau melontarkan kritik). Mutu dan kecerdasan yang akan jadi ajang kebebasan diredam melalui pendidikan massal jangka panjang,¹⁹ Caranya yaitu:

“Dengan membuka seluruh tingkat dan jenis perguruan yang seragam pada semua daerah, kota dan desa, membuka perguruan tinggi dengan berbagai fakultas dan jurusan agar dapat menampung tamatan perguruan menengah sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan

¹⁸ A.A. Navis, 1000 Tahun Nusantara (Tiga Ragam Pendidikan yang Terlupakan). (Jakarta: Kompas, 2000), hal 387.

¹⁹ Ibid, hal 388.

kondisi, situasi dan realitas kemampuan dan kebutuhan esensial dari masyarakat umumnya, bahkan dengan mengorbankan mutu”²⁰.

Dengan perlakuan tersebut, akan berakibat pada rendahnya kualitas manusia Indonesia terutama dalam kemampuan berfikir dan daya intelektualitasnya. Rendahnya kualitas tersebut menyebabkan para peserta didik bangsa ini tidak mempunyai daya kritis, kurang percaya diri dan pada akhirnya tidak mempunyai sikap terhadap berbagai kejadian yang ada. Kemampuan untuk bersikap dan mempunyai pertimbangan terhadap berbagai keadaan yang dihadapinya merupakan ciri-ciri dari manusia dewasa tidak dimiliki oleh para peserta didik, karena kemampuan seorang manusia dewasa yang erat sekali dengan kediriannya sebagai seorang individu tak kan tercipta dalam keadaan individu yang tertekan, tidak bebas dan terbelenggu oleh sistem yang ada. Oleh karena itu para peserta didik bangsa ini hanya akan menjadi *follower* (pengikut) terhadap sistem yang ada, tidak menjadi seorang kritikus atau inovator yang handal ketika menghadapi gejolak budaya bangsa.

Reformasi pendidikan harus segera dilakukan oleh bangsa ini. Pola pendidikan yang ada harusnya menciptakan manusia yang berbudaya, bermoral dengan perangkat nilai-nilai etika yang baik (kemanusiawian, hak-hak asasi manusia, hak-hak demokrasi, kemerdekaan manusia dan sebagainya). Selain itu dukungan juga diperlukan dari struktur politik, sosial dan ekonomi yang terbuka, pembagian kemakmuran yang merata dan adil, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.²¹ Untuk menuju kepada cita-cita tersebut dan menyelesaikan permasalahan yang ada, perombakan sistem harus dilakukan. Dalam perombakan tersebut perlu dilakukan penelaahan yang mendalam tentang sistem pendidikan mana yang benar-benar sesuai dengan karakter kebudayaan bangsa ini, karakter budaya bangsa yang terdiri dari karakter-karakter ragam budaya dan suku yang ada di Indonesia. Melalui penyesuaian tersebut diharapkan bahwa bangsa ini benar-benar mengenali budayanya sendiri. Dalam proses pendidikan yang berjalan kemudian penanaman sikap kritis dan evaluatif dalam dunia pendidikan menjadi hal yang tak boleh dilupakan. Sikap kritis dan evaluatif

²⁰ Ibid.

²¹ Mochtar Lubis, *Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal 257.

akan menyeleksi secara alamiah hal yang mana saja sebagai nilai-nilai kebudayaan yang pantas untuk diteruskan, perlu diperbaharui atau bahkan dihilangkan. Dengan pola pendidikan seperti itu bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dengan budayanya sendiri dan berkembang karena sikap kritis dan evaluatif seperti apa yang telah dijelaskan di atas. Dan, agar bangsa Indonesia jangan sampai menjadi binatang ekonomi seperti yang dituduhkan oleh orang Jepang beberapa waktu yang lampau.²²

2.4 Indonesia di Tengah Situasi Global Pergantian Abad

Pengertian globalisasi itu sendiri adalah terintegrasinya seluruh negara, bangsa, dan umat manusia di muka bumi ini menjadi satu kehidupan bersama, menyatu dan dibarengi dengan relatif lenyapnya batas-batas ruang dan waktu.²³ Dalam asas persamaannya globalisasi itu sendiri secara tidak langsung memaksa setiap negara untuk mengambil peran dalam kancah dunia tersebut. Pergantian abad yang sekaligus pergantian era globalisasi merupakan hal yang memberatkan bagi bangsa ini. Globalisasi gelombang ke-2 (dimulai dari awal abad ke-21 sampai saat ini) muncul saat bangsa ini mengalami berbagai macam krisis, yakni krisis moral, ekonomi, identitas dan lain sebagainya. Berat rasanya bagi bangsa ini untuk ikut berperan dalam kancah dunia tersebut. Krisis multi dimensional yang dialami menjelang pergantian abad menghancurkan bangsa ini dari berbagai macam sisi hingga menyebabkan keadaan bangsa ini tidak stabil dalam berbagai keadaan. Padahal untuk turut aktif dalam persaingan era globalisasi tersebut dibutuhkan keadaan bangsa yang stabil baik dari segi politik, perekonomian maupun keamanannya. Indonesia sebagai negara berkembang harus segera memperbaiki keadaan perekonomiannya terlebih dahulu sebelum terjun ke dalam era globalisasi tersebut. Namun untuk memperbaiki keadaan perekonomian secara cepat dan setelah krisis multi-dimensional yang terjadi tidaklah mudah adanya. Apalagi di tengah-tengah situasi negara-negara maju yang terus menghimpit negara-negara berkembang dengan berbagai macam politiknya. Situasi penghimpitan tersebut terbukti dalam kesepakatan GATT (*General Agreement on*

²² Ibid.

²³ Riant Nugroho d dan Tri Hanurita S, Tantangan Indonesia: Solusi Pembangunan politik Negara Berkembang. (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2005), hal 45.

Trade and Tariffs) dalam putaran Uruguay pada tahun 1986 dan kemudian diratifikasi pada tahun 1994, yang dilakukan oleh negara-negara super kaya dan super makmur yang tergabung dalam G-7. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Kanada, Jerman dan Italia. GATT merupakan upaya untuk menerobos kebijakan-kebijakan proteksi dan monopoli yang diterapkan hampir di semua negara berkembang untuk melindungi sektor industrinya, baik manufaktur maupun jasa, yang relatif masih bayi dan belum bisa berlomba dengan industri negara-negara maju.²⁴

“Meski namanya “globalisasi” namun terdapat perbedaan yang pokok di antara Globalisasi I (abad ke-15 sampai abad ke-19) dengan Globalisasi II (awal abad ke-21 sampai saat ini). Di G-1, pemain utamanya adalah Inggris yang digerakkan oleh angkatan laut Inggris dan Poundsterling, disusul negara-negara kapitalis Eropa lain, seperti Spanyol, Portugis, Prancis dan Belanda. Sedangkan G-II aktornya adalah Amerika Serikat dengan dolar Amerikanya, Angkatan bersenjata AS, ditambah kebudayaan Amerika dan organisasi-organisasi global yang dimotori serta disponsori oleh AS, seperti PBB, Bank Dunia dan IMF. Di belakang AS, mengejar Negara-negara G-7”.²⁵

Sebelum memasuki era globalisasi gelombang ke-2 ini saja bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu *collapse*, “bagaimana untuk menghadapi era globalisasi selanjutnya”. Kejatuhan bangsa Indonesia tidak terlepas dari keadaan para pemimpinnya yang memiliki mentalitas korupsi, ‘asal bapak senang’, segala sesuatunya ingin cepat dan berbagai macam kebobrokan mental lainnya. Mentalitas-mentalitas tersebut yang menyebabkan Indonesia jatuh dan sulit untuk keluar dari krisis. Kehidupan para pemimpin orde baru yang bercorak kuat, otoriter, dan absolut tersebut runtuh seketika pada tengah tahun 1997. Ketika krisis baru melanda Thailand, Rabu, 2 Juli 1997, dengan jatuhnya nilai baht, Indonesia yakin tidak akan kena. Fundamental ekonomi Indonesia kuat, baik kata para elite, pejabat maupun ekonom. Hanya dalam sebulan topeng itu rontok. Orang ramai-ramai tukar rupiah ke dolar AS, yang hanya Rp 2.400 per dolar.²⁶ Dengan kejadian seperti itu devisa negara akan habis dan menimbulkan

²⁴ Ibid, hal 63.

²⁵ Ibid, hal 56.

²⁶ Parakritri T. Simbolon, 1000 Tahun Nusantara (Indonesia Memasuki Milenium Ketiga). (Jakarta: Kompas, 2000), hal 4.

keruntuhan perekonomian Indonesia. Keruntuhan tersebut diakibatkan oleh gejala global yang tak mampu diatasi oleh negeri ini. Kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin di negeri ini yang mampu mengatasi perekonomian, menghilangkan kemiskinan, dan menciptakan segala macam kebaikan bagi bangsa ini runtuh bersamaan dengan runtuhnya orde baru. Kejatuhan orde baru tersebut merupakan bukti dari kerja para pemimpin di negeri ini yang hanya sampai pada tahap sikap 'seolah-olah'.²⁷ Seolah-olah mampu, bisa dan pandai dalam mengatasi tantangan global dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di negeri ini.

Sejalan dengan perubahan global tersebut, kondisi morat-marit di dalam negeri, baik di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan (kerusuhan antara etnis, SARA dan seterusnya), degradasi moral para pemimpin politik (banyaknya korupsi dan seterusnya), penurunan mentalitas manusia Indonesia akibat sistem pendidikan maupun tuntutan hidup yang lebih mementingkan faktor ekonomi mengakibatkan bangsa dan negara ini lemah sebagaimana yang terjadi sekarang. Namun di tengah-tengah berbagai macam keadaan yang kurang menguntungkan tersebut, saat ini bangsa Indonesia tetap berusaha untuk bangkit, bangkit memperbaiki mental, ekonomi, pendidikan dan segala macam bidang lainnya. Hal tersebut guna mendukung bangsa ini untuk ikut serta dalam era globalisasi jauh ke depan.

2.5 Gambaran Umum Buruknya Kualitas Manusia Indonesia

Kekerasan, politik uang dan korupsi mendominasi warna kehidupan politik di Indonesia. Berbagai peristiwa tragis terjadi, seperti: kerusuhan disertai penjarahan, penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan (Mei 1998). Kekerasan yang lebih kejam lagi berlangsung dalam konflik antar etnis dan antar agama (Pontianak, Sampit, Ambon dan Poso).²⁸ Semua kejadian tersebut meninggalkan korban, trauma, pengungsian dan penderitaan yang berkepanjangan. Pendapat dari

²⁷ Ibid, hal 6.

²⁸ Haryatmoko, op.cit. hal ix.

beberapa tokoh Indonesia dalam seminar²⁹ yang diadakan pada bulan Maret tahun 1983 di Palembang mengenai kualitas manusia Indonesia dapat dijadikan gambaran secara umum tentang kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Pendapat dari beberapa tokoh Indonesia yang menghadiri seminar tersebut tentunya bukan sekadar ucapan lisan belaka tetapi merupakan hasil pengamatan dan pemikiran yang telah dikaji sebelumnya. Tokoh-tokoh Indonesia tersebut, diantaranya: menteri dalam negeri (pada tahun 1983) Suparjo, Selo Sumardjan, Sajidiman, Koentjaraningrat, Arief Budiman dan Sarlito Wirawan. Supardjo menyebutkan adanya sikap pasif, untuk tidak mengatakan sikap masa bodoh, yang masih mewarnai peta psikologis dan mentalitas sebagian tertentu masyarakat Indonesia. Mentalitas pembangunan yang ideal seperti prakarsa, sikap produktif, kesediaan untuk mengorbankan kepentingan-kepentingan marjinal dan sebagainya, ternyata masih relatif lemah. Selo Sumardjan menyebutkan adanya gejala korupsi yang semakin meluas, gelombang kejahatan yang semakin meningkat, ketegangan antara golongan kaya dan miskin, keresahan ratusan ribu orang yang tidak sempat memperoleh pendidikan. Sajidiman menunjuk pada kelemahan bangsa, misalnya, kurang adanya sikap bersungguh-sungguh, terlalu lekas puas dan mudah putus asa. Koentjaraningrat mengatakan perlunya melakukan penelitian terhadap konsep kekuasaan dan sistem kepemimpinan yang beraneka warna di negeri kita yang luas ini. Arief Budiman menyebutkan adanya manusia yang serakah. Sementara Sarlito Wirawan, disebuah surat kabar menulis tentang orang-orang muda yang sudah dijangkiti hasrat kekuasaan.

Kualitas manusia yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, struktur ekonomi, politik, nilai-nilai budaya dan moral yang berlaku serta kualitas para pemimpin yang menjadi panutan dalam masyarakat. Apabila kualitas dari luar pribadi tersebut buruk maka sulit rasanya bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang berkembang menuju bangsa yang maju dari segi peradaban moral dan perekonomian. Kita harus mencermati berbagai macam perilaku moral bangsa tersebut agar dapat menjadi bangsa yang dapat memperbaiki dirinya dan dapat bangkit menjadi bangsa yang mendekati

²⁹ Mochtar Lubis, op.cit. hal 185-186.

ideal baik dari segi moral perilaku ataupun kemajuan perekonomian yang mantap. Perumusan atas perilaku yang ada harus dilakukan secara serius, dijabarkan tentang perilaku mana saja yang perlu dikembangkan, perilaku mana saja yang harus diperbaiki atau bahkan harus dihilangkan dari kepribadian manusia bangsa ini. Setelah penjabaran dan perumusan telah dilakukan tentunya konsistensi yang berpegang pada prinsip perubahan perlu dipertahankan dari setiap individu yang ada agar bangsa ini dapat keluar dari kemelut moral dan kepribadian bangsa yang bobrok yang merupakan hasil bentukan dari kepribadian manusia di dalamnya.

2.6 Rangkuman

Berbagai macam kejadian (konflik kemanusiaan, krisis di dunia pendidikan, serta keadaan ekonomi yang tidak stabil) yang dialami bangsa Indonesia satu dekade terakhir ini seharusnya dapat dijadikan bahan evaluasi kritis. Evaluasi kritis yang dapat menyadarkan bangsa ini bahwa betapa buruknya moral bangsa, berbagai kejadian yang telah dialami dan pentingnya sebuah gerakan perubahan yang berguna bagi kemajuan bangsa ini ke depannya. Jika bangsa ini telah menyadari dan menjadikan keburukan-keburukan yang telah lalu sebagai sebuah pembelajaran maka tidak mustahil bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju seperti bangsa Jepang atau bangsa-bangsa barat lainnya. Gerakan perubahan tersebut hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai beban terhadap para pemimpin pemerintahan, guru atau para pemimpin agama. Hendaknya gerakan kesadaran akan perubahan ini dimaknai oleh seluruh individu yang mengaku sebagai bagian dari bangsa Indonesia.